

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen mutu terpadu (MTM) atau Total Quality Management (TQM) merupakan sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan. MMT awal mulanya berasal berasal dari dunia bisnis. Sedikit sekali literature yang membahar tentang MMT dalam bidang pendidikan sebelum tahun 1989-an. Sehingga mau tidak mau pada saat itu literatur MMT di dunia bisnis menjadi acuan utama dalam penerapannya di dunia pendidikan. MMT adalah metode baru yang membuka mata dan fikiran para pengelola pendidikan dengan memandang mutu sebagai keharusan dan absolut.

Metode MMT lahir pertama kali di Amerika pada awal tahun 1990-an dan dalam tahun yang sama Inggris juga mengadopsi metode ini. Pada tahun inilah MMT mulai berkembang dalam system pendidikan di dua Negara tersebut. Reorganisasi lembaga pendidikan yang mengadopsi system MMT bermula dari pendidikan tinggi dan berlanjut kepada sekolah-sekolah yang ada di Amerika dan Inggris.

Meskipun MMT mulai berkembang dan dikenal orang bukan berarti tidak ada kontra dari lembaga pendidikan lainnya yang ada di Negara tersebut. Masih terdapat keengganan dari sebagian besar lembaga pendidikan dalam penerapan metode baru ini. Keengganan itu di dasari pada alasan kurang minatnya dari masing-masing lembaga atas penggunaan metode bisnis dalam pendidikan. Mereka menganggap proses pendidikan tidaklah sama dengan proses penciptaan produk-produk layaknya dalam dunia industri.

Namun sikap kontra tersebut tidak berlama-lama dengan adanya strategi baru yang dilakukan oleh pelaku pendidikan yang betul-betul ingin menerapkan MMT dalam pendidikan. Strategi tersebut berupa penempatan guru dalam industry. Dari sanalah kerjasama antara pendidikan dan dunia bisnis mulai menemukan titik titik terang. Kerja sama tersebut merubah

paradigm pelaku pendidikan lainnya untuk menerima konsep bisnis dalam penerapannya dalam dunia pendidikan.

Dengan timbulnya pemahaman dan kerjasama yang baik tersebut membuat para pelaku pendidikan yang awalnya kontra menjadi pro. Keinginan untuk terus mengkaji dan menerapkan konsep mutu menjadi berkembang pesat. Peningkatan mutu menjadi semakin penting untuk dipahami dan dilaksanakan bagi setiap lembaga pendidikan. Awalnya mutu sebagai sesuatu yang dipertentangkan berubah menjadi sesuatu yang perlu dilakukan. Pelayanan atas jasa pendidikan menjadi prioritas utamabagi institusi. Dimana pelayanan tersebut tertuju pada siswa sebagai pelanggan pendidikan.

Fokus atas kebutuhan pelanggan menjadi hal yang tak asing lagi terdengar dari masing-masing institusi. Semua melek akan mutu, segala kegiatan diarahkan pada terciptakan kepuasan dari pelanggan yang dimiliki. Kegiatan berbasis perencanaan muali dilakukan. Transparansi program sekolah menjadi suatu prinsip yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Transparansi program dilakukan guna memberikan kejelasan kepada orang tua tentang program pendidikan dan bias memberikan masukan dari para orang tua.

Beranjak dari sana mulailah manajemen mutu terpadu dalam pendidikan mendapatkan dukungan resmi dari beberapa lembaga. Kurang lebihnya tercatat 16 lembaga pendidikan yang menyatakan siap untuk melaksnakan MMT. Pada tahun itu (1991) para Dewan Rektor dan Kepala Sekolah mulai mempublikasikan MMT lewat sebuah buku yang berjudul "*Teaching Standards and Excellence in Higher Education*". Dari tahun tersebutlah muali MMT dikenal oleh kebeberapa Negara lainnya dan terus berkembang hingga saat ini. Bahkan sekarang termasuk Indonesia manajemen mutu terpadu bukan lagi sesuatu yang asing kita dengar melainkan telah mendarah daging dalam system pendidikan nasional kita.

Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri.¹ Sebagaimana yang telah

¹ H. A. R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 80

terjadi pada dunia produksi pada umumnya, kepedulian akan mutu produk pendidikan pun didorong oleh persoalan dasar, bagaimana mengintegrasikan semua fungsi dan proses dalam suatu organisasi agar tercapai peningkatan mutu secara berkelanjutan.²

Permasalahan pendidikan pada umumnya selalu dihadapan pada permasalahan pemerataan, relevansi, dan kualitas pendidikan. Berbagai upaya peningkatan kualitas hidup yang dilakukan manusia memerlukan penanganan serius melalui pemikiran yang matang dengan mengaplikasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan untuk meningkatkan kualitas tersebut telah lama diupayakan manusia dalam berbagai upaya. Kegiatan tersebut dengan dikenal dengan penjaminan mutu yang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dalam melaksanakan interaksi pendidikan.³

Perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan yang semakin kuat mengarah pada pendidikan sebagai investasi kini telah mengkondisikan semua sektor pendidikan harus menjadi lembaga yang mampu memberikan nilai balik ekonomi yang menguntungkan. Sebuah unit pendidikan harus mampu menjadikan lulusan yang handal berkompetisi, dapat memberikan penguatan secara individual untuk penyebaran ilmu pengetahuan, sehingga lembaga pendidikan harus proaktif dan menjadi lembaga yang efisien dan efektif. Untuk terealisasinya sebuah lembaga pendidikan yang mampu berkompetisi dan mampu menjadi tumpuan investasi masyarakat, maka kehadiran penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting. Dalam perspektif manajemen pendidikan, penjaminan mutu memiliki nilai penting yang signifikan karena penjaminan mutu bersifat spesifik dan eksistensinya sangat tergantung pada sistem tempat berlakunya jaminan mutu berada, sehingga dapat berbeda antara perencanaan desain dengan pendekatan yang diterapkan.

² Idhoci Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 19

³ Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 549.

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Pengadaan buku pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah.⁴

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah yang ada menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi.

PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu; 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 91).⁵

Kualitas atau mutu dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menjamin setiap orang memperoleh pendidikan yang sesuai. Untuk mendapatkan standar

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Edisi 3, 3.

⁵ Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 5.

kualitas yang sesuai dan menjaganya memang bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan ataupun praktisi pendidikan perlu memiliki acuan atau pedoman tentang kualitas dan bagaimana menjaga kualitas.

Kualitas pendidikan menjadi tujuan yang selalu diperjuangkan oleh *stakeholder* pendidikan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan organisasi penyelenggara satuan pendidikan selalu berupaya agar pendidikan yang diselenggarakan mempunyai kualitas baik. Kualitas pendidikan yang baik akan menjadi instrumen untuk berkembangnya lembaga pendidikan sekaligus menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan kualitas lulusan yang unggul maka kualitas SDM ke depan akan mampu eksis dalam dinamika perubahan dan pembangunan nasional. Terwujudnya kualitas pendidikan yang baik membutuhkan *guideline* yang akan mengarahkan penyelenggaraan pendidikan ke arah yang benar (*in the track*).

Kualitas pendidikan menjadi tujuan yang selalu diperjuangkan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi penyelenggara satuan pendidikan selalu berupaya agar pendidikan yang diselenggarakan mempunyai kualitas yang baik. Kualitas pendidikan yang baik akan menjadi instrumen untuk berkembangnya lembaga pendidikan sekaligus menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan kualitas lulusan yang unggul, tentunya kualitas SDM ke depan akan mampu eksis dalam dinamika perubahan dan pembangunan nasional.

Bekasi, “Keberhasilan Kepala Sekolah dinilai dari keberhasilannya memenuhi 8 standar pendidikan.” Tegas HM. Ali Fauzie, MPd, kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam sambutannya pada acara Ekspose sekolah Model Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Kota Bekasi yang digelar di Global Persada Mandiri School, Sabtu (18/11). Ekspose ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Provinsi Jawa Barat sebagai kelanjutan dari program Sekolah Model yang ditetapkan oleh LPMP.⁶

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Menurut Ibu Inayatullah, Sekolah Model di kota Bekasi sangatlah berpeluang besar menjadi *pilot project* di tingkat nasional dengan berkaca dari 20% lebih dari APBD Kota Bekasi di alokasikan untuk pendidikan. Tidak hanya soal anggaran, Inayatullah membeberkan bahwa pihaknya juga memiliki tenaga pengawas sebagai pengendali mutu (Quality Assurance) yang sangat memahami program dan konsep budaya mutu yang nantinya akan dikembangkan oleh sekolah model- sekolah model tersebut.⁷

Setiap satuan pendidikan wajib menjalankan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu suatu pendidikan di sekolah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan keseluruhan fungsi manajemen pendidikan yang mengemban tugas dan tanggungjawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu. SMP Negeri 8 Bekasi merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dari Hasil Grandtour di SMP Negeri 8 Bekasi bahwa sekolah ini berdiri pada tahun 1986. Sekolah SMP Negeri 8 Bekasi menjadi salah satu program Sekolah Model yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat. SMP Negeri 8 Bekasi dipilih dari sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah ini sebagai upaya untuk memenuhi SNP tersebut. SMP Negeri 8 Bekasi melakukan program sekolah model ini sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Tahun 2020 adalah tahun terakhir SMP Negeri 8 Bekasi diawasi oleh LPMP, Setelah dilepas oleh LPMP menjadi SPMI mandiri. Artinya, sekolah ini tetap menjalankan SPMI tersebut tetapi tidak diawasi oleh LPMP, yang akan mengawasi yaitu dari pengawas Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tahun

⁶ <https://disdik.bekasikota.go.id> diakses pada tanggal 23 desember 2019

⁷ m.rakyatbekasi.com diakses pada tanggal 23 desember 2019

2020 target sekolah dikota Bekasi sudah SPMI, saat ini ada 16 sekolah termasuk sekolah SMP Negeri 8 Bekasi.

Jadi Alasan Memilih sekolah tersebut karena sekolah tersebut sudah menjadi sekolah model pada tahun 2022 dan telah memenuhi Standar Nasional dan telah di akui oleh LPMP Provinsi Jawa Barat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti perlu menentukan fokus masalah. Penelitian ini hanya membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 8 Bekasi. Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan akan membahas tentang:

- a. Penetapan Standar Mutu Pendidikan
- b. Pemetaan Standar Mutu pendidikan
- c. Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan
- d. Pemenuhan Mutu Pendidikan
- e. Evaluasi atau Monitoring

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemetaan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 8 Bekasi?
2. Bagaimana Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 8 Bekasi?
3. Bagaimana Pelaksanaan atau Implementasi Mutu Pendidikan di SMP Negeri 8 Bekasi?
4. Bagaimana Evaluasi atau Monitoring Mutu Pendidikan di SMP Negeri 8 Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui pemetaan mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan mutu pendidikan, evaluasi atau monitoring mutu pendidikan dan analisis mutu pendidikan di SMP Negeri 8 Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan keilmuan dari konsep yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan juga sebagai bahan pembelajaran.

2. Secara Praktis

1) Bagi pendidik/guru

Sebagai pendidik yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan yang baik dan sesuai dengan tujuan dari pendidikan

2) Bagi Siswa

Sebagai siswa dalam proses pembelajaran siswa diharapkan mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan standar mutu pendidikan.